

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN POLITIK

Esti Mei Yahzinka
Universitas PGRI Yogyakarta
Estimey31@gmail.com

Abstrak

Riset ini disusun dengan tujuan mengetahui peran Pendidikan Kewarganegaraan apabila dikembangkan dengan ilmu Pendidikan Politik. Dasar dari Pendidikan Kewarganegaraan secara umum adalah untuk memberikan arahan dan petunjuk guna membuka wawasan seseorang dalam bernegara sesuai dengan hati nuraninya masing-masing, yang mana Pendidikan Kewarganegaraan tersebut sejalan dengan fungsi Pendidikan Politik yang erat kaitannya dengan proses pengendalian diri, mengambil keputusan, dan mengetahui konsekuensi atas dasar tujuan politik yang sudah diambil sebelumnya. Selain itu, Pendidikan Politik pun merupakan sesuatu yang krusial yang patut dipelajari atas dalam rangka memperkokoh sikap demokratis waga negara, ikut andil dalam organisasi kemasyarakatan, serta menganalisis hambatan yang muncul dalam membangun sikap demokratis dalam masyarakat. Metode riset ini dilakukan dengan pengumpulan data menggunakan teknik metode kualitatif dimana lebih menjabarkan dari sudut pandang analisa, dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan pendidikan kewarganegaraan merupakan sebagai pendidikan politik yang dimana segala landasan atau teori berpolitik terdapat didalam pendidikan kewarganegaraan

Kata kunci: Pendidikan politik, pendidikan kewarganegaraan,

Abstract

This research was prepared with the aim of knowing the role of Citizenship Education when developed with the science of Political Education. The basis of Citizenship Education in general is to provide direction and guidance to open one's insights in the state in accordance with their own conscience, where citizenship education is in line with the function of Political Education that is closely related to the process of self-control, decision making, and knowing the consequences on the basis of political objectives that have been taken before. In addition, Political Education is also something crucial that should be studied in order to strengthen the democratic attitudes of the state, participate in community organizations, and analyze the obstacles that arise in building democratic attitudes in society. This research method is done by collecting data using qualitative method techniques which better describe from the point of view of analysis, where it can be concluded that the development of citizenship education is as a political education where all political foundations or theories are contained in citizenship education

Keywords: Political education, citizenship education,

PENDAHULUAN

Negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah regional tertentu yang didalamnya terdapat kekuasaan yang dipimpin oleh orang-orang tertentu, serta terdapat kewenangan dan kebijakan yang disusun dengan tujuan mencerdaskan dan melindungi kehidupan bangsa didalamnya. Menurut Usman (2015), pada dasarnya para ahli ketatanegaraan masih memberikan pengertian yang beraneka

ragam mengenai negara, baik dipandang dari sudut kedaulatan maupun negara dinilai dari sudut peraturan-peraturan atau hukum seperti pengertian yang dikemukakan oleh para ahli Ilmu Ketatanegaraan. Aristoteles (384 - 322 SM), salah seorang pemikir negara dan hukum zaman Yunani misalnya, memberikan pengertian negara, yaitu kekuasaan masyarakat yang bertujuan

untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia.

Suatu negara memiliki unsur-unsur yang harus ada didalamnya, yaitu penduduk, wilayah, pemerintah, dan kedaulatan. Penduduk merupakan seseorang yang tinggal dalam suatu daerah tertentu pada suatu negara, kemudian warga negara merupakan seseorang yang menempati suatu daerah dalam suatu negara dan diakui secara hukum. Selanjutnya, wilayah atau daerah tertentu yang menjadi hak teritorial dari sebuah kedaulatan negara. Kemudian, terdapat pemerintahan yang merupakan unsur yang memegang kekuasaan serta kewenangan dalam bernegara. Unsur yang terakhir yaitu kedaulatan, dimana kedaulatan yang memiliki pengertian berupa suatu hak yang dimiliki untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri.

Pada hakekatnya, negara didirikan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan tanah airnya, oleh karena itu disusunlah tugas-tugas suatu negara guna memenuhi tujuan akan kesejahteraan tersebut. Menurut Mu'allifin (2016), negara mempunyai tugas, yaitu pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. Kedua, tugas negara untuk mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Sedangkan fungsi yang harus dijalankan negara adalah pertama, melaksanakan penertiban (*law and order*) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ketiga, pertahanan, untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Keempat, menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui

badan badan pengadilan. Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi negara, negara mempunyai sifat memaksa dengan menggunakan konstitusi-hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat harus ditaati.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan berupa metode kualitatif, dimana sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Dalam pelaksanaannya metode ini cenderung bersifat subjektif dimana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus pada landasan teori. Dalam penelitian ini juga lebih menekankan aspek pemahaman yang dalam dan mendasar terhadap suatu masalah dari pada melihat masalah untuk penelitian generalisasi. Dimana generalisasi sendiri yaitu konsen dengan penerapan hasil suatu penelitian untuk kasus atau situasi di luar dari apa yang diteliti dalam penelitian. Sedangkan waktu penelitian memiliki rentan waktu dari bulan Februari hingga Juni.

Pengambilan data serta prosedur pelaksanaannya pun diambil dari analisis secara tidak langsung, sedangkan untuk instrument penelitiannya menggunakan metode studi pustaka, dimana pengumpulan informasi atau data bersumber dari buku, majalah, dan internet.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses para generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dalam hal ini yaitu menjadi warga negara yang baik atau demokratis. Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dalam mengajarkan warga negara untuk bersikap aktif. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu upaya

yang mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, merupakan upaya khusus dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Oleh karena itu, peranan pendidikan kewarganegaraan adalah membina warga negara khususnya pelajar sebagai generasi penerus yang lebih baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Hamisa, 2018).

Menurut Istikharah (2019), pendidikan dan politik merupakan dua hal yang berbeda, namun memiliki tujuan utama yang saling mendukung satu sama lain. Keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Pendidikan menyangkut proses transmisi ilmu pengetahuan dan budaya, serta perkembangan keterampilan dan pelatihan yang membawa perubahan pada diri individu terdidik. Sedangkan politik berkenaan dengan praktik kekuasaan, pengaruh dan otoritas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi nilai-nilai dan sumber daya. Karena keduanya sarat dengan proses pengalokasian dan pendistribusian nilai-nilai dalam masyarakat, maka tidaklah sulit untuk memahami bahwa pendidikan dan politik adalah dua perangkat aktivitas yang akan terus saling terkait dan berinteraksi.

Menurut Sukarno (2012), pendidikan politik adalah pengembangan kesadaran generasi terhadap berbagai problematika kekuasaan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pendidikan politik bisa dilakukan dengan berbagai sarana seperti diskusi, ceramah, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Pendidikan politik merupakan proses dialogis antara pemberi dan penerima

pesan, melalui pesan ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik yang ideal dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti pemerintah, sekolah, dan partai politik. Sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti yang longgar. Disadari atau tidak, hal itu dialami oleh semua anggota masyarakat baik elit maupun orang awam.

Menurut Wahyu (2015), pendidikan kewarganegaraan merupakan praktik dari ilmu kewarganegaraan, sedangkan ilmu kewarganegaraan adalah bagian dari ilmu politik. Seperti yang dikemukakan oleh Checter, yakni bagian dari ilmu politik yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara terdapat di *civics* atau ilmu kewarganegaraan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan mengandung praktik-praktik yang diturunkan ilmu politik. Sesuai dengan tujuan PKn yaitu menjadikan warganegara yang baik. Maka harus dipahami teori tentang demokrasi politik yang meliputi konstitusi, partai politik pemilu dan semua hal itu merupakan adopsi dari ilmu politik. Dengan memahami teori ilmu politik maka warga negara mempunyai pengetahuan tentang kenegaraan melalui praktis dari pendidikan kewarganegaraan maka warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dan mengetahui hak yang harus diterimanya sebagai warga negara yang baik.

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengembangan pendidikan kewarganegaraan itu dapat dibilang sebagai pendidikan politik. Penulis juga membuat rencana dengan berbagai pengumpulan sumber data yang dicari melalui referensi internet dengan daftar pustaka yang tercantum di bawah,serta menyertakan pendapat-pendapat para ahli

tentang pendidikan kewarganegaraan maupun pendidikan politik.

Prewitt & Dawson (1977 : 140 – 141) menyatakan ada tipe pengajaran politik yaitu PKn (civic education) dan indoktrinasi politik. James Coleman, membedakan antara kedua tipe itu, bahwa PKn atau latihan kewarganegaraan (civic training) merupakan bagian dari pendidikan politik yang menekankan bagaimana seorang warga negara yang baik berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsanya. Dan yang dimaksud indoktrinasi politik lebih memperhatikan belajar ideologi politik tertentu yang dimaksudkan untuk merasionalisasi dan menjustifikasi rezim tertentu.

Alfian (1992), dalam bukunya *Pemikiran Dan Perubahan politik Indonesia* menyatakan “Pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun” (p.235).

(Zamroni,2007:p.137).Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yg dilakukan oleh lembaga pendidikan dg proses mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik, sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional, sehingga menguntungkan bagi masyarakat dan tidak sendiri.

Dari data diatas dapat dianalisa bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan cikal bakal dari pendidikan politik, dan erat hubungannya. Mengapa demikian, karena pendidikan kewarganegaraan mengandung segala unsure dari pendidikan politik. Teori sistem yang dianut PKN yaitu melaksanakan aturan hukum, menghargai

hak orang lain, memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, melakukan kontrol terhadap para pemimpin yang dipilihnya dalam melaksanakan tugas – tugasnya, melakukan komunikasi dengan para wakil di sekolah, pemerintah local, pemerintah nasional, memberikan suara dalam suatu pemilihan, membayar pajak, menjadi saksi di pengadilan,bersedia untuk mengikuti wajib militer.

Teori tersebut dapat membawa konsekuensi PKn pada posisi untuk kepentingan system maintenance dan system persistence bagi sistem politik nasional (sistem politik demokrasi Pancasila). Dengan demikian pengembangan materi PKn bidang politik terutama mengambil porsi demokrasi politik dari ilmu politik. Porsi demokrasi politik dipahami dalam struktur ilmu politik yaitu baik sebagai pemikiran, filsafat , teori ,ideologi dan terapannya dalam konstitusi dan sistem politik.

KESIMPULAN

Dari analisa serta data-data yang tertera diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan pendidikan kewarganegaraan merupakan sebagai pendidikan politik yang dimana segala landasan atau teori berpolitik terdapat didalam pendidikan kewarganegaraan. Keduanya bersinambungan dan berhubungan erat, bahkan dibahas segala tata cara atau norma berpolitik juga terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan.

Sebaiknya, mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dari mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan dalam kehidupan bernegara. Sebaiknya, mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dari mempelajari Pendidikan Politik demi kemaslahatan bangsa. Sebaiknya, baik pemerintah maupun sesama warga negara, tidak membungkam upaya seseorang

dalam berpendapat terkait isu yang sedang
terjadi dalam rangka merepresentasikan

negara yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.kompasiana.com/fiqydhealentera/57bd42b2ae7e612e142aa3e1/pendidikanpolitik-pentingnya-pendidikan-politik-dalam-masyarakat>
<https://www.dosenpendidikan.co.id/pendidikan-kewarganegaraan/>
<https://www.padamu.net/sejarah-pendidikan-kewarganegaraan>